

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan Cina dan Myanmar telah terjalin dengan baik sejak 1950 dan terus berkembang seiring berjalannya waktu (USIP Senior Study Group, 2018). Hubungan antara Myanmar dengan Cina berawal pada tahun 1949 ketika Myanmar menjadi negara non-komunis pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Cina. Keduanya memulai hubungan diplomatik pada tahun 1950 dan terus berkembang pesat hingga era modern. Cina dan Myanmar mulai bekerja sama secara intensif pada tahun 2009 ketika Thein Sein menjabat sebagai perdana menteri Myanmar dan membuat kesepakatan dengan Cina untuk membangun jaringan pipa minyak dan gas yang menghubungkan pelabuhan Kyaukphyu ke Kunming dan mengembangkan Bendungan Myitsone di wilayah Kachin (USIP Senior Study Group, 2018).

Tahun 2013 Cina menjadi tuan rumah dalam pembicaraan antara Organisasi Kemerdekaan Kachin dengan pemerintah Myanmar di Yunnan yang memperjelas peran Cina dalam proses perdamaian internal Myanmar. Kemudian Aung San Suu Kyi selaku pemimpin partai *National League for Democracy* (NLD) yang saat itu memenangkan pemilihan umum, mengunjungi presiden Xi Jinping untuk pertama kalinya pada Juni 2015. Kemudian hubungan ini juga diperkuat dengan partisipasi kedua dalam berbagai forum bersama. Pada tahun 2016, Cina menghadiri *Union Peace Conference-21<sup>st</sup> Century Panglong* di Naypidaw. Aung San Suu Kyi

menghadiri forum Belt and Road yang dicetuskan oleh presiden Cina Xi Jinping pada Mei 2017 (USIP Senior Study Group, 2018).

Cina juga ikut serta dalam upaya perdamaian Myanmar dengan mengusulkan rencana *Three-Point* untuk mengatasi krisis Rohingya, namun sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Myanmar, Cina menentang resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan *Tatmadaw* (Angkatan bersenjata) untuk mengakhiri kampanye melawan Rohingya. Tahun 2018 Cina dan Myanmar merundingkan kesepakatan untuk mengembangkan Pelabuhan Kyaukphyu yang sempat tertunda. Namun di tahun 2019, Cina kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi di Rakhine state dan mendukung upaya perdamaian di Myanmar (USIP Senior Study Group, 2018).

Terjadinya kudeta militer tahun 2021 di Myanmar juga mendapatkan respon dari Cina dan memiliki dampak terhadap hubungan keduanya. Kudeta militer bermula dari pemilihan umum yang digelar pada tanggal 8 November 2020. Pemilihan umum ini kembali dimenangkan oleh partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dengan total 346 kursi di parlemen (BBC Indonesia, 2020).

**Tabel 1.1 Perolehan Suara Pemilu Tahun 2021 di Myanmar**

Ranking	Political Party	2015	2020	Change
1	National League for Democracy	390	396	6
2	Union Solidarity and Development Party	41	33	-8
3	Shan Nationalities League for Democracy	15	15	Same
4	Arakan National Party	22	8	-14
5	Ta'ang (Palaung) National Party	5	5	Same
6	Mon Unity Party	0	5	5
7	Pa-O National Organization	4	4	Same
8	Kayah State Democratic Party	0	5	5
9	Kachin State People's Party	0	1	1
10	Arakan Front Party	0	1	1

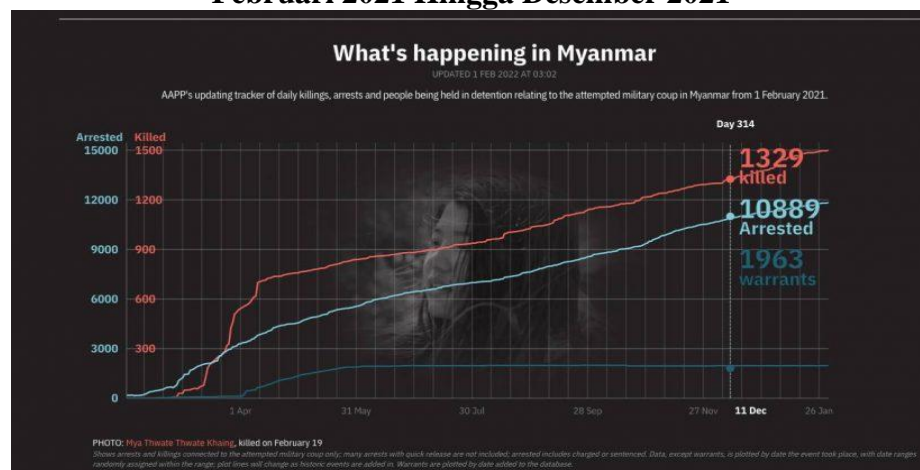
Sumber: (Nguyen, 2020)

Dengan adanya hasil tersebut pihak oposisi militer yang tergabung dalam *Union Solidarity and Development Party (USDP)* mengatakan tidak mengakui hasil pemilu dan meminta pihak berwenang untuk mengadakan "pemilihan yang bebas, adil, tidak memihak dan bebas dari kampanye yang tidak adil" (BBC Indonesia, 2020). Pihak militer juga menganggap *Union Election Commission Myanmar (UEC)* tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Pihak militer berasumsi bahwa terjadi sebuah kecurangan karena dari awal pemilihan umum ini diselenggarakan dalam rentang waktu yang dinilai kontroversial karena komisi pemilihan umum sempat menunda dan membatalkan pemilihan umum di wilayah yang sedang berkonflik seperti di wilayah Shan, Kachin, dan wilayah-wilayah yang terdapat etnis-etnis minoritas yang berkonflik. Hal ini menimbulkan perdebatan karena sekitar dua juta orang kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemilu (BBC Indonesia, 2020). Meskipun tidak memiliki cukup bukti untuk menangkap

kecurangan yang terjadi, militer tetap melaporkan kecurangan ini. Beberapa bulan setelah pemilu yakni pada 1 Februari 2021, Junta Militer melakukan pengambil alihan kekuasaan politik atau yang biasa dikenal dengan kudeta. Akibat kudeta ini, terjadi penahanan pemimpin politik, aktivis, dan pemimpin senior NLD di Naypyidaw dan negara bagian lainnya (Ashadi, 2022).

Masyarakat terutama anak muda dan aktivis turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi dan menyuarakan pendapatnya terhadap kudeta ini di Kota Yangon saat terjadi pemblokiran ketat oleh pihak militer. Pasukan keamanan membubarkan pendemo dengan menggunakan kendaraan lapis baja dan mengeluarkan tembakan. Kegiatan unjuk rasa ini kemudian berkembang menjadi kerusuhan dan memakan banyak korban jiwa yang tentu saja kemudian menjadi perhatian global (CNBC Indonesia, 2021).

**Gambar 1.1 Tahanan Politik dan Korban Jiwa Perlawanan Kudeta Sejak Februari 2021 Hingga Desember 2021**



Sumber: (Assistance Association for Political Prisoners, 2022)

Menurut data dari *Assistance Association for Political Prisoners* (AAPP), setidaknya terdapat 1.329 korban jiwa dan 10.889 orang yang ditangkap oleh pihak

militer terhitung mulai dari 1 Februari 2021 hingga 11 Desember 2021. Banyaknya korban kekerasan dan penahanan ini kemudian menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak seperti ASEAN, PBB, dan negara-negara lainnya. Kecaman-kecaman tersebut ditujukan kepada pihak militer untuk segera menghentikan serangan bersenjata terhadap warga sipil di Myanmar (CNN Indonesia, 2021).

Terjadinya kudeta militer ini menimbulkan banyak perubahan sikap dari komunitas internasional terhadap Myanmar. Meninjau dari banyaknya korban dan kerusuhan yang terjadi ini, banyak negara yang mengecam pihak militer Myanmar untuk segera menemukan solusi perdamaian. Perubahan sikap yang diterima Myanmar ini dimulai dari respon ASEAN yang mengeluarkan 5 poin konsensus pada KTT ASEAN tanggal 24 April 2021 silam (CNN Indonesia, 2021). Myanmar juga seharusnya mendapatkan giliran untuk menjadi ketua ASEAN pada tahun 2026, namun atas kesepakatan bersama akhirnya Filipina ditunjuk untuk menggantikan Myanmar menjadi ketua ASEAN pada tahun 2026 (CNN Indonesia, 2023). Selain negara-negara ASEAN, dewan keamanan PBB juga mengecam tindakan Junta Militer Myanmar dan mengeluarkan resolusi perdamaian untuk Myanmar, semua anggota menyetujui kecuali Cina, Rusia, dan India (UN Security Council, 2022). Tindakan yang diambil Cina ini dinilai sebagai bentuk pembelaan terhadap Myanmar dari kecaman berupa penolakan resolusi ini merupakan bentuk kebijakan yang melibatkan sebuah kepentingan nasionalnya.

Hubungan antara Cina dan Myanmar yang erat ini merupakan suatu hubungan dinamis yang perubahannya dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk ketika muncul sebuah konflik internal di salah satu negara tersebut, topik ini telah

diteliti oleh peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian yang mengangkat isu terkait hubungan Cina dengan Myanmar adalah penelitian milik (Sausan, 2018) yang berjudul “Analisis Kepentingan Republik Rakyat Cina (RRC) dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar terhadap Rohingya Periode 2012-2017”, dalam penelitiannya Sausan menganalisis kepentingan Cina dalam kebijakannya terhadap isu Rohingya di Myanmar tahun 2012-2017 dengan menggunakan teori *Rational Choice* yang akan dijadikan landasan oleh penulis untuk menganalisis penelitian baru dengan fokus konflik kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021. Literatur lainnya yang menjadi sumber informasi bagi penulis untuk penelitian ini adalah buku laporan dari (USIP Senior Study Group, 2018) yang berjudul “*Cina’s Role in Myanmar’s Internal Conflicts*” berisi tentang dinamika hubungan Myanmar dan Cina, serta analisis peran Cina dalam konflik internal Myanmar. Konflik internal Myanmar memang menuai banyak respon dari komunitas internasional seperti yang tertuang dalam karya yang ditulis oleh (Deb & Khai, 2023) dipenelitiannya yang berjudul “*The changing dynamics of Cina-Myanmar relations post the Military Coup - From Hedging to Bandwagoning?*” ini meneliti bagaimana sikap Cina sebagai aktor dengan peran besar dalam menanggapi konflik kudeta militer di Myanmar tahun 2021.

Dari literatur-literatur di atas belum ada penelitian yang menjelaskan secara spesifik tentang analisis kepentingan Cina dalam mengambil kebijakan terhadap Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021. Penelitian ini meninjau dari literatur yang sudah ada tentang kepentingan Cina dalam konflik Myanmar yang terdahulu terkait krisis Rohingya untuk menganalisis kepentingan nasional Cina, dan literatur

tentang sikap Cina terhadap konflik kudeta militer Myanmar 2021 untuk mencari informasi terbaru tentang kebijakan luar negeri Cina terhadap Myanmar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan pada sub bab sebelumnya, maka penulis menemukan rumusan masalah berupa pertanyaan :

“Mengapa Cina memilih untuk tetap mempertahankan hubungan baiknya dengan Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021 ketika PBB berusaha menjatuhkan sanksi dan negara-negara di kawasan ASEAN melakukan pengucilan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum, penulis menulis penelitian ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Adapun tujuan khusus yang dimaksud oleh penulis dalam menulis penelitian ini adalah untuk menganalisis motif kebijakan luar negeri Cina terhadap di Myanmar pasca kudeta militer pada tahun 2021. Penulis memilih untuk mengambil fokus analisis kebijakan luar negeri Cina terhadap Myanmar pasca kudeta tahun 2021 karena hubungan Myanmar dengan Cina sebelumnya sangat erat, dan kudeta ini tentunya mempengaruhi hubungan Myanmar dengan

komunitas internasional, tentunya kebijakan yang diambil Cina setelah terjadinya konflik internal di Myanmar ini menjadi sebuah topik menarik untuk diteliti.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan sebuah teori untuk menganalisis perilaku sebuah negara, mengkaji alasan di belakang pengambilan kebijakan suatu negara berdasarkan urgensi yang prioritas negara tersebut. Kepentingan nasional bukan hanya sekedar teori atau konsep abstrak, kepentingan nasional memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan politik luar negeri (Nugraha, Sinaga, & Dermawan, 2022). Teori kepentingan nasional ini terbentuk dengan dasar pemikiran realisme yang percaya bahwa negara selalu memiliki kepentingannya sendiri dalam tindakan yang diambilnya.

Definisi kepentingan nasional menurut beberapa ahli, yang pertama Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara dalam melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultur dari gangguan negara lain (Suharsono, Mahroza, & W, 2018). Sedangkan menurut Paul Seabury, kepentingan nasional dapat dilihat melalui dua sudut pandang yaitu secara deskriptif yang mengartikan kepentingan nasional sebagai tujuan yang harus dicapai melalui kepemimpinan pemerintah, dan yang kedua yaitu secara normatif yang mengartikan kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita bangsa yang harus dicapai dengan cara berhubungan dengan negara lain. Daniel S. Paap membagi beberapa aspek yang terdapat dalam kepentingan nasional antara



lain adalah ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas.

Kepentingan nasional ini ditentukan oleh keadaan masyarakat, kondisi geopolitik negaranya, dan kondisi politik internasional, karenanya kepentingan nasional ini bersifat dinamis. Setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda karena itu untuk mencapai kepentingan nasionalnya negara menciptakan sebuah strategi dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional selalu berhubungan dengan keamanan dalam konteks kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyatnya serta kebutuhan wilayah. Teoretisi kebijakan luar negeri yang memberikan perhatian kepada isu pertahanan atau keamanan mungkin mengambil pendekatan kaum realis, yang selalu menekankan benturan kepentingan di antara aktor-aktor negara (Jackson & Sorensen, 2013).

Kepentingan nasional tumbuh dari berbagai aspek sesuai dengan kondisi negaranya. Bagi negara periferi, kepentingan nasional yang dituju cenderung tentang perekonomian yang dapat ditempuh dengan memulai hubungan baik dengan negara lain yang dapat membantunya memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup masyarakatnya. Sebaliknya, bagi negara inti yang memiliki pemerintahan dan perekonomian yang kuat, kepentingan nasional yang dituju cenderung untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaannya dengan memperbanyak kerja sama untuk mencari sekutu. Kerja sama antara negara periferi dengan negara inti ini dapat bersifat saling menguntungkan atau malah sebaliknya, keduanya memiliki kepentingan nasional yang berbeda namun tidak bersifat kontradiksi karena saling melengkapi. Pandangan buruk tentang kerja sama untuk

pemenuhan kepentingan nasional ini dapat menimbulkan kebergantungan negara periferi terhadap negara inti (Maiwan, 2017). Dalam teori kepentingan nasional, konsep moralitas cenderung tidak berlaku dalam pengambilan dan pembuatan kebijakan luar negeri. Negara akan mengambil kebijakan luar negeri yang paling menguntungkan, sekalipun harus mengorbankan negara lain untuk memenuhi kepentingannya.

#### **1.4.2 Rational Choice Theory**

*Rational choice theory* merupakan salah satu dari tiga model dalam pembentukan kebijakan yang diusung oleh Graham Allison yang mengusung tiga model pembuatan kebijakan yang pertama yaitu *Rational Actor Model*, *Organization Behavior Model*, dan *Governmental Politics Model*. Menurut model *rational choice*, negara dapat dengan benar mengidentifikasi tantangan kebijakan luar negeri dan membuat keputusan terbaik yang memungkinkan dalam hal keuntungan dan biaya, memperhitungkan tujuan dan nilai negara (Jackson & Sorensen, 2013). Pembuatan kebijakan dengan model *Rational Choice Theory* ini merujuk ke pemahaman dasar konsep realisme yang berpendapat bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh sebuah negara tidak akan terlepas dari kepentingan nasional negara tersebut. Aktor yang maksud dalam teori ini adalah sebagai pembuat keputusan, dalam teori ini proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan harus dipastikan rasional dan optimal. Teori *Rational Choice* ini berawal dari teori ekonomi yang berpendapat bahwa manusia mengambil keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan kalkulasi keuntungan dan kerugian.

Ide dasar pilihan rasional adalah tindakan individu dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan suatu tujuan sehingga dengan adanya tujuan tersebut terbentuklah pilihan-pilihan dalam bertindak (Pujileksono & Siregar, 2022). Dalam teori *Rational Choice* ini pengambilan keputusan kebijakan luar negeri melibatkan serangkaian faktor yang sangat kompleks karena lingkungan internasional merupakan produk interaksi dari berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik, (Coplin, 1974). Dalam pembuatan kebijakan ini, tidak ada satu pilihan pasti yang tidak memiliki resiko. Tujuan-tujuan yang dipertimbangkan dalam menentukan sebuah pilihan sering kali bertentangan, terutama mengenai kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan yang biasanya berbenturan. Misalnya, dalam satu kondisi hubungan bilateral dua negara ini sangat menguntungkan di bidang ekonomi, namun jika ditinjau dari aspek keamanan dan politik maka akan merugikan (Coplin, 1974). Kepentingan ekonomi yang dimaksud di sini adalah kebijakan yang bisa menghasilkan materi dan menaikkan nilai ekonomi negaranya, biasanya ditempuh melalui kerja sama di sektor industri atau pasar jual beli. Kerja sama bilateral yang menyangkut pembangunan seperti jaringan pipa migas dan perdagangan biasanya bersifat berkelanjutan dan terus menghasilkan nilai ekonomi bagi kedua pihak (Bolesta, 2018). Nilai sosial yang menjadi pertimbangan dari hasil kebijakan luar negeri adalah hubungan baik antar negara yang akan memudahkan segala urusan. Dalam membentuk kebijakan luar negeri perlu meninjau akses pendidikan yang menentukan tingkatan sumber daya manusia yang akan menunjang efektivitas tindakan dalam hubungan luar negeri (Jackson & Sorensen, 2013)0. Sedangkan nilai politik yang dimaksud di sini

cenderung tentang stabilitas wilayah dan dominasi, kebijakan luar negeri yang baik adalah yang dapat memperluas dominasi atau kuasa negara tersebut di komunitas regionalnya, ketika sebuah negara dapat memperluas dominasinya maka akan lebih mudah untuk memberi pengaruh terhadap negara lain serta mempertahankan dirinya sendiri (Jackson & Sorensen, 2013). Menimbang kebutuhan dan keuntungan yang bisa diraih dari aspek ekonomi, sosial, dan politik akan menimbulkan pemikiran yang rasional. Pembuat kebijakan akan dihadapkan dengan beberapa pilihan alternatif dengan nilai keuntungan dan konsekuensi yang berbeda, maka pembuat kebijakan harus meninjau kembali serta mengevaluasi pilihan alternatif satu persatu agar bisa menentukan pilihan yang terbaik. Ketika suatu negara harus membuat kebijakan maupun keputusan dalam kondisi terdesak, maka yang harus diutamakan adalah keamanan dan keberlangsungan hidup negaranya dan cenderung tidak bisa mengambil keuntungan, di kondisi ini pilihan alternatif yang terbaik adalah yang bisa menumbuhkan rasa aman bagi sebuah negara tersebut (Affianty, 2015).

Dalam tulisannya, (Dewi, 2018) menjelaskan pemikiran *rational choice* menurut beberapa ahli di antaranya adalah Charles W. Kegley dan Shanon Blanton yang berpendapat bahwa *Rational Choice* merupakan teori yang berisi prosedur pembuatan keputusan atau kebijakan berdasarkan situasi yang ada dengan berbagai pertimbangan sebelum mengambil opsi terbaik dari segala alternatif yang ada demi mencapai hasil yang paling optimal, dan Andrew T. Guzman yang berpendapat bahwa kepentingan suatu negara akan mendorong suatu tindakan rasional untuk

berusaha mencari keuntungan terbesar bagi negaranya dengan cara mengidentifikasi kondisi yang ada tanpa memikirkan kepentingan negara lain.

Prosedur dalam pengambilan kebijakan dalam *rational choice* ini merupakan satu hal yang paling vital dalam optimalisasi kebijakan. Memahami kondisi serta kebutuhan negara adalah langkah pertama dalam pembuatan kebijakan rasional, selanjutnya seorang aktor pembuat kebijakan harus bisa menentukan urutan prioritas kepentingan nasional dan memahami konsekuensinya, setelah itu baru bisa menentukan pilihan dari beberapa opsi alternatif yang paling menguntungkan. Untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut, negara harus konsisten dalam menjalankan kebijakannya.

### **1.4.3 Foreign Policy**

Kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya, yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dengan organisasi internasional serta aktor-aktor pemerintah (Jackson & Sorensen, 2013). Pemerintah memutuskan sebuah tindakan yang harus diambil untuk memenuhi cita-cita dengan membuat kebijakan. Kebijakan luar negeri sendiri dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan dalam urusan eksternal atau hubungan negara lain.

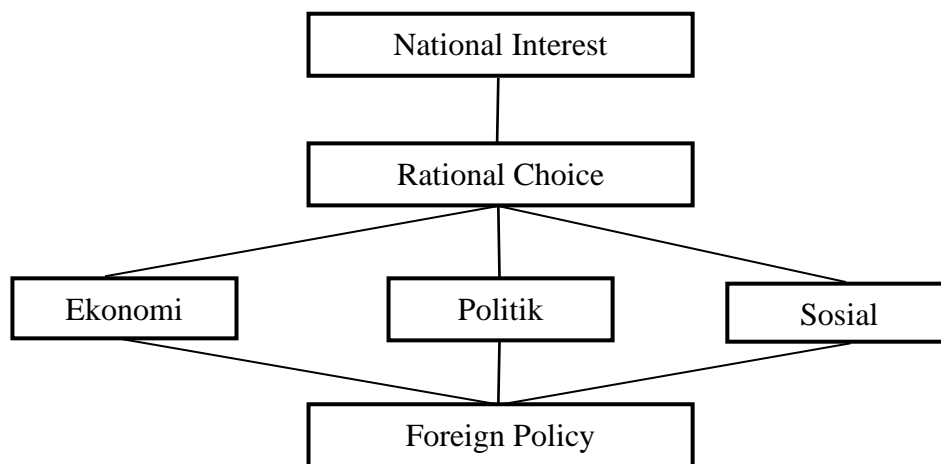
Menurut K.J. Holsti beberapa tujuan dirancang untuk mengubah keadaan luar negeri demi kepentingan sebuah negara, kebanyakan dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan domestik, seperti keamanan, otonomi, kesejahteraan, dan prestise (Affianty, 2015). Pembuatan kebijakan luar negeri menentukan cara sebuah

negara dalam memenuhi tujuan, kepentingan nasional atau menemukan solusi dengan melibatkan hubungan luar negeri.

Kebijakan luar negeri dipilih dari beberapa pilihan alternatif yang ada dengan berbagai aspek untuk ditimbang. Menentukan keputusan ini diperlukan pemikiran yang rasional dengan meninjau dampak positif dan negatif, serta menentukan keputusan yang paling menguntungkan bagi negaranya. Dalam pembuatan suatu kebijakan luar negeri tentunya memerlukan pertimbangan dan perhitungan tindakan serta metode yang paling memungkinkan baginya untuk meraih suatu cita-cita, serta biaya dan manfaat dari opsi kebijakan berbeda yang tersedia (Jackson & Sorensen, 2013). Kebijakan luar negeri dinilai ideal jika memiliki sedikit resiko atau dampak buruk dan memiliki banyak keuntungan untuk memenuhi kepentingan nasional.

### 1.5 Sintesa Pemikiran

**Gambar 1.2 Sintesa Pemikiran**



Sumber: diolah penulis

Berdasarkan sintesa di atas, penulis akan menjelaskan konsep pengambilan kebijakan luar negeri menghubungkan pendekatan-pendekatan tersebut. Penulis

mengkaji penentuan kebijakan dengan meninjau kepentingan nasional yang mendorong sebuah pemikiran rasional dari pembuat kebijakan yang perlu meninjau dari beberapa aspek baik ekonomi, politik, maupun sosial. Pemikiran rasional akan menghasilkan beberapa pilihan alternatif dengan nilai dan konsekuensi yang berbeda. Pembuat kebijakan harus menempatkan negaranya sebagai pihak yang paling diuntungkan dalam sebuah hubungan dengan pihak luar. Pilihan alternatif yang tersedia ini harus dipilih secara rasional dengan mempertimbangkan pilihan yang paling menguntungkan dan memiliki resiko paling kecil bagi negara tersebut, hasil dari pilihan rasional inilah yang digunakan sebagai kebijakan luar negeri.

### **1.6 Argumen Utama**

Dalam menanggapi konflik kudeta Myanmar tahun 2021, Cina menyesuaikan kebijakan dan tindakan-tindakan yang diambilnya terhadap Myanmar dengan berlandaskan kepentingan nasionalnya. Cina sebagai negara yang bersinggungan langsung dengan Myanmar secara wilayah serta salah satu partner terbesar Myanmar yang sudah melakukan kerja sama ini tentunya mendapat dampak konflik kudeta militer ini. Cina memilih untuk mempertahankan hubungan baiknya dengan Myanmar mengingat adanya kepentingan nasional yang harus dicapai dari kerja sama yang berlangsung. Hal ini kemudian secara rasional ditinjau dari beberapa aspek yaitu ekonomi, politik, dan sosial. Dalam aspek ekonomi Cina beranggapan bahwa hubungannya dengan Myanmar akan membawa keuntungan ekonomi bagi Cina dari proyek pembangunan jaringan pipa migas dan juga proyek kerja sama ekonomi perbatasan Cina-Myanmar yang telah meningkatkan perdagangan terhadap kedua negara tersebut. Secara politik dapat dilihat bahwa Cina

mempertahankan hubungannya dengan Myanmar untuk menjaga stabilitas kawasannya serta memperluas dan menjaga dominasinya di kawasan Asia. Dalam aspek sosial, mempertahankan hubungan baik dengan negara tetangga yang bersinggungan secara geografis merupakan hal yang sangat penting untuk mempermudah kehidupan masyarakatnya terutama masyarakat di wilayah perbatasan.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.3 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif dengan teknik analisis kualitatif yang menjelaskan dan memahami alasan dari terjadinya suatu peristiwa dengan menghubungkan satu variable dengan variable lainnya. Penelitian eksplanatif digunakan untuk mengkaji hubungan sebab akibat dari variable-variabelnya. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep- konsep yang sensitif, menggambarkan kenyataan berganda, teori lapangan, dan mengembangkan pemahaman (Mundir, 2013).

Penggunaan tipe penelitian ini digunakan untuk mengkaji alasan yang menjadi latar belakang pengambilan kebijakan Cina terhadap Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021, serta mencari keterkaitannya dengan kepentingan nasional Cina terhadap hubungannya dengan Myanmar.

### **1.7.4 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini adalah mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Penulis memilih meneliti pada rentang waktu di mulai dari tahun 2021 berdasarkan



terjadinya pengalihan kekuasaan oleh militer Myanmar dan penahanan pimpinan politik pada tanggal 1 Februari 2021. Penelitian ini dibatasi hingga tahun 2023 karena kerja sama di antara Cina dan Myanmar masih terus berjalan hingga saat ini, di tahun 2023 juga terdapat peristiwa penting di mana pihak Presiden Cina Xi Jinping menghadiri konferensi dan menyampaikan pidato mengenai perkembangan hubungan dengan Myanmar.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen pemerintah, buku, jurnal ilmiah, berita, *website*, laporan lembaga pemerintahan, dan literatur lainnya yang sesuai dengan topik pada tahun 2021.

#### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik atau sifat sesuatu (Purba & Simanjuntak, 2011). Untuk bisa membuat argumen saat menggunakan jenis penelitian kualitatif peneliti dapat mengumpulkan hasil wawancara, analisis dokumen, diskusi hingga transkrip observasi (Rita, et al., 2022).

#### **1.7.7 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Kepentingan Cina dalam Pengambilan Kebijakan Luar Negerinya Terhadap Myanmar Pasca Kudeta Militer

2021 ini penulis membagi menjadi empat bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian.

BAB II berisi penjelasan mengenai kepentingan nasional Cina dalam pengambilan kebijakan luar negerinya dalam menanggapi konflik Myanmar ditinjau dari aspek ekonomi.

BAB III berisi penjelasan mengenai kepentingan nasional Cina dalam pengambilan kebijakan luar negerinya dalam menanggapi konflik Myanmar ditinjau dari aspek sosial politik.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran.